TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN EKORIPARIAN SUNGAI CILIWUNG DI KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR

MUHAMMAD IRFAN MAULANA¹; SAWITRI BUDI UTAMI²; NINA KARLINA³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹muhammad17246@mail.unpad.ac.id; ²sawitri.budi@unpad.ac.id; ³ninakarlina@gmail.com

ABSTRACT

Watershed degradation that occurs such as erosion, sedimentation, pollution, and even changes in land use for settlements and economic activities has continued to this day since the first time the watershed was legally stipulated in Government Regulation No. 33 of 1970 on Forest Planning. However, this degradation continues to this day, one of the reasons is that there is no integrated action and effort by parties related to watershed management. One of the watersheds experiencing degradation is the Ciliwung watershed. In response to this problem, an Ecoriparian watershed management model was initiated which in its development involves the government, the private sector, and the community. However, in the development process, a collaborative governance framework has not been found. In this study, the researcher aims to analyze the formation of collaborative governance in the development of the Ciliwung River Ecoriparian in Sukaresmi Village, Tanah Sareal District, Bogor City. The theoretical basis used in this study uses the three-dimensional theory of collaborative governance formation by Bryson et al in 2020. This study uses a qualitative method. Data collection techniques are used by researchers by way of observation, interviews, literature studies, and documentation. Furthermore, the data processing techniques used by researchers in this study used data reduction, data presentation, and concluding. The results of this study indicate that collaborative governance has not been established in the development of the Ciliwung River Ecoriparian in Sukaresmi Village, Tanah Sareal District, Bogor City. This is based on the fact that there are still several things that must be improved again to form a collaborative governance in the development of the Ciliwung River Ecoriparian in Sukaresmi Village, Tanah Sareal District, Bogor City.

Keywords: watershed, ecoriparian, collaborative governance

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE ECORIPARIAN DEVELOPMENT OF THE CILIWUNG RIVER IN SUKARESMI, TANAH SAREAL, BOGOR CITY

ABSTRAK

Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sedimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini terdapat sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah *framework* tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Kata Kunci: daerah aliran sungai, ekoriparian, tata kelola pemerintah kolaboratif

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung saat ini menjadi salah satu dari 13 DAS yang saat ini sedang dalam keadaan kritis, yang disebabkan oleh perubahan lahan menjadi pemukiman masyarakat yang berdampak pada degradasi lahan DAS. Permasalahan ini tentunya terkait dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di sekitar DAS Ciliwung yang melewati kota-kota besar dan padat penduduk, seperti: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan DKI Jakarta. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut menyebabkan kurang lebih 50% lahan DAS sudah beralih fungsi menjadi pemukiman masyarakat (Wasis & Erizal, 2013).

Fenomena alih fungsi lahan DAS untuk menjadi pemukiman padat penduduk selanjutnya menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, dan teridentifikasi pula permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS Ciliwung. Permasalahan lingkungan yang menyebabkan keadaan DAS Ciliwung semakin kritis terjadi karena disebabkan oleh semakin terdesaknya lingkungan asli DAS Ciliwung yang menyebabkan turunnya daerah resapan air, tingginya pasokan banjir, tingginya sedimentasi dan buruknya sistem drainase (Pramono et al., 2016). Permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi saling terkait dengan permasalahan lingkungan yang terjadi, dengan karakteristik masyarakat yang berpendidikan rendah berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program rehabilitasi lingkungan yang dilakukan seperti program rehabilitasi hutan lahan (RHL) (Suwarno et al., 2011). Keadaan ekonomi masyarakat yang mayoritas berpendapatan rendah juga mengakibatkan tidak terkontrolnya penggunaan lahan oleh masyarakat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi primer yang sifatnya berjangka

waktu pendek (Kadri, 2006). Hal ini didorong oleh kondisi kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor primer yang kegiatan usahanya mengandalkan lahan DAS Ciliwung yang semakin lama semakin terbatas (Aini et al., 2018). Pesatnya pertumbuhan industri pengolahan dan jasa di daerah sekitar DAS Ciliwung juga mendorong perkembangan aktivitas ekonomi sektor sekunder dan tersier masyarakat. Daerah yang didominasi oleh industri pengelolaan dan jasa ini membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitarnya, dengan hal ini menimbulkan pertumbuhan pesat penduduk di sekitar daerah tersebut, sehingga rata-rata kepadatan penduduk di sebagian besar kabupaten/kota yang dilewati DAS Ciliwung diatas 400 orang/km² (Pramono et al., 2016).

Fenomena ini mengisyaratkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rentan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan suatu DAS (Cahyono, 2015). Permasalahan-permasalahan tersebut berimplikasi dan menyebabkan dampak besar bagi daerah yang dilewati oleh DAS Ciliwung, dampak yang besar tersebut terutama terkait dengan permasalahan bencana banjir yang terjadi setiap musim penghujan (Alviya et al., 2016). Dalam menanggulangi dampak yang disebabkan oleh permasalahan di DAS Ciliwung banyak solusi-solusi yang sudah dilakukan dan direncanakan, bahkan secara perundang-undangan pengelolaan DAS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kehadiran peraturan pemerintah ini didukung oleh peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang secara eksplisit mengamanatkan kewajiban kepada setiap orang dalam pengelolaan DAS dan pemeliharaan lahan yang ada dalam pasal 30 ayat (1-2) dan diterangkan juga sanksi yang ada apabila ada pihak-

pihak yang secara sengaja melakukan konservasi lahan DAS yang mengakibatkan degradasi berat pada pasal 60 ayat 2 dan 5.

Akan tetapi banyak dari solusi dan rencana pengelolaan DAS yang dilaksanakan tidak berjalan secara maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih kurang optimalnya koordinasi dari *stakeholder* terkait yang mengakibatkan pengelolaan DAS menjadi terfragmentasi, hal ini menimbulkan miskordinasi dan mispersepsi pengelolaan antar para *stakeholder* (Pramono et al., 2016). Permasalahan pada pengelolaan ini membutuhkan sebuah konsep pengelolaan baru yang dapat mengkolaborasikan seluruh *stakeholder* yang terkait. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini akhirnya mendorong untuk melakukan pengelolaan DAS Ciliwung bersama dengan 15 sungai prioritas lainnya menggunakan konsep ekoriparian (Rahmawaty, 2019). Konsep ekoriparian merupakan konsep perencanaan riparian yang memiliki upaya untuk menurunkan beban pencemaran dari limbah domestik dan menjadikan daerah pengembangan tersebut menjadi pusat edukasi dan konservasi lingkungan (Radnawati & Makhmud, 2020). Penggunaan konsep pengelolaan ekoriparian yang mengikutsertakan berbagai entitas dalam masyarakat dinilai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi yang berada di lingkungan tersebut.

Salah satu DAS Ciliwung yang ditargetkan menjadi lokasi pengembangan ekoriparian ini adalah DAS Ciliwung yang berada di Kota Bogor. Kota Bogor yang merupakan bagian tengah dari DAS Ciliwung ini merupakan penyumbang terbesar arus air yang berpotensi menyebabkan banjir di DKI Jakarta, hal ini dikarenakan curah hujan yang mencapai 3500-4000 mm/tahun dan terjadi juga perubahan lahan DAS Ciliwung untuk kebutuhan komersil (Pontoh & Sudrajat, 2009). Pada tahun 2016 menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

mencatatkan jumlah penduduk yang berada di sekitar DAS Ciliwung Kota Bogor berjumlah 815.288 jiwa (Alfian & Vitaloka, 2018). Tingginya angka kepadatan penduduk Kota Bogor yang bermukim di sekitar DAS Ciliwung mendorong peningkatan alih guna lahan menjadi permukiman sekitar 9% pertahunnya yang berakibat semakin terdegradasinya kualitas lahan di sekitar DAS Ciliwung (Pontoh & Sudrajat, 2009). Daerah yang menjadi salah satu lokasi pengembangan ekoriparian di Kota Bogor ini berada Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal, tepatnya berada di belakang daerah perumahan Graha Grande.

Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan pengembangan program ekoriparian ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi di sekitar DAS Ciliwung dengan mengikutsertakan berbagai pihak dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Keikutsertaan dari *stakeholders* tersebut dalam pengembangan program ini ditujukan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya suatu pengelolaan DAS yang menitik beratkan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam proses mencapai tujuan bersama itu masing-masing *stakeholders* teridentifikasi memiliki peran yang berbeda yang disesuaikan guna memecahkan permasalahan yang ada. Pemerintah Kota Bogor sebagai komando utama dalam pengembangan ekoriparian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai fasilitator Organisasi Perangkat Daerah (ODP) dan Dinas yang terkait dalam pengembangan ekoriparian, lalu terdapat beberapa dinas yang berperan sebagai pelaksana dan pendukung dalam pengembangan ekoriparian ini seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan,

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sekertariat Daerah, dan Lurah Kelurahan Sukaresmi. Pihak swasta yang teridentifikasi oleh peneliti yaitu Perusahaan Swasta yang diberikan porsi untuk berinvestasi dalam pengelolaan ekoriparian dengan menggunakan sistem *Corporate Social Responsibilities* (CSR). Keikutsertaan pihak swasta dalam pengembangan program ini ditujukan untuk mengisi bagian yang menjadi kekurangan dari pihak pemerintah, seperti contohnya adalah pihak swasta dapat mendonasikan uang atau infrastruktur dalam pengembangan ekoriparian ini dengan timbal balik perusahaan tersebut mendapatkan citra baik dari pihak lainnya karena turut serta dalam pembangunan program ekoriparian. Dari pihak masyarakat peneliti mengidentifikasi beberapa pihak yang terlibat yaitu: Satuan Tugas (Satgas) Sungai Ciliwung, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar), dan masyarakat sekitar Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaresmi. Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan ekoriparian ini selain menjadi salah satu sasaran pengembangan program, masyarakat juga berperan dalam mengelola kawasan ekoriparian dan menjaga kualitas lingkungan ekoriparian tersebut.

Cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor ini sejalan dengan dasar arahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 354 yang membahas secara jelas agar pemerintah daerah melibatkan multipihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan daerah, maka pengelolaan ekoriparian yang menitik beratkan terhadap kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat ini dapat dikaitkan dengan gagasan *collaborative governance*. Hadirnya gagasan *collaborative governance* ini memaknai pentingnya kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam berkolaborasi. *Collaborative*
eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

Governance didefinisikan oleh Ansell & Gash sebagai sebuah rangkaian pengaturan dimana satu lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan melalui proses kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Akan tetapi walaupun *stakeholders* terkait sudah dapat teridentifikasi beserta dengan peran-perannya peneliti belum dapat mengidentifikasi suatu bentuk model tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Beberapa hal yang belum dapat teridentifikasi oleh peneliti seperti, model *framework* yang digunakan dalam proses pengembangan program ini, batasan dari wewenang berbagai pihak dalam pengembangan program dan strategi-strategi untuk meningkatkan dukungan antara *stakeholders* yang terlibat. Hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan apabila melihat tujuan dari pengembangan ekoriparian yang menitik beratkan kolaborasi antara *stakeholder* yang terkait terutama pemerintah sebagai inisiator dalam pengembangan program tersebut. Dengan adanya model tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan program ini diharapkan dapat membentuk sebuah *framework* yang dapat membantu program ini untuk menyatukan tujuan dan kepentingan antar *stakeholders* agar tercapai *output* dari pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Menurut Bryson et al pembentukan dari tata kelola pemerintahan kolaboratif ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu: *Forums*, *Arenas* dan *Courts* (Bryson et al., 2020). Aspek-

aspek penting yang terdapat di dalam dimensi *forums* adalah

1. *Communicative Capability*

Communicative Capability secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kapasitas dalam menciptakan dan menyampaikan arti dari komunikasi yang terjadi. Beberapa hal yang termasuk dalam *communicative capability* seperti, kemampuan retorika, kemampuan untuk menggunakan berbagai media untuk berkomunikasi atau kemampuan untuk mengumpulkan audiens pada saat dibutuhkan

2. *Interpretative Schemes*

Interpretative Schemes dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja intersubjektif yang manusia gunakan untuk membangun kognisi, interpretasi atau pemahaman terkait peristiwa yang memaknainya dan dapat memungkinkan manusia untuk mengartikulasikan dan mengevaluasi kembali peristiwa yang dialaminya.

Schutz dalam (Bryson et al., 2020:170) menambahkan individu dan kelompok yang menjadi bagian dari interpretative schemes yang terbentuk dari hal-hal yang relevansinya ditentukan oleh keprihatinannya masing-masing. Oleh karena itu Dorst menambahkan dalam (Bryson et al., 2020:170) bahwa di dalam forum kompetisi, konflik atau kontradiksi dalam interpretative scheme setidaknya harus dimediasikan untuk menyatukan dan memunculkan aksi bersama.

Selanjutnya Bryson et al mengemukakan bahwa terdapat

beberapa hal untuk membantu menengahi di antara berbagai skema tersebut, yaitu

i. *Norms of Pragmatic Communication*

Terdapat empat kriteria praktikal untuk menilai kemampuan berbicara yang digunakan untuk mempengaruhi aksi: Aktor yang diekspektasikan untuk berbicara diharapkan dapat berbicara secara komperhensif, tulus, tepat dan akurat dalam konteks pembicaraan.

ii. *Modes of Arguments*

Argumentasi merupakan aspek penting lainnya untuk menengahi perbedaan intepretasi yang berbeda. Argumentasi terbentuk melalui ide dan hasil kreasi yang diuji melalui bagian dari pengembangan persuasive dalam kerangka masalah dan solusi. Desain dan penggunaannya pada forum dipengaruhi oleh informasi, jenis argumen dan bobot apa yang digunakan untuk mendukung argumen tersebut.

iii. *Rules Governing Access*

Terakhir, akses yang dipengaruhi oleh *rules governing* akan mempengaruhi siapa yang akan berbicara, lalu apa, di mana, kapan, kenapa dan siapa yang akan mendengar.

Oleh karena itu hal ini sangatlah mempengaruhi keputusan, isu, konflik dan preferensi kebijakan yang akan didiskusikan.

Desain dan penggunaan forum dalam berbagai keadaan menghasilkan dua hal. Yang pertama menetapkan dasar struktur yang bersifat kolektif dari daftar keputusan, isu, konflik dan preferensi kebijakan yang berpotensi akan diperdebatkan. Kedua, di satu sisi hal ini dapat memediasi transformasi dari daftar tersebut menjadi keputusan, masalah, konflik dan preferensi kebijakan aktual yang akan dibahas kemudian, lalu di lain sisi mengurangi hal-hal yang tidak relevan untuk dibahas kemudian.

Berikutnya menurut Bryson et al aspek terpenting yang menjadi perhatian utama dalam dimensi *Arenas* adalah *Decision-Making Capabilities*. Menurut Pfeffer dalam (Bryson et al., 2020:171) kemampuan dalam mengambil keputusan oleh aktor yang ada untuk mempengaruhi tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan tergantung dari peraturan dan sumber daya yang dapat mereka gunakan. Selanjutnya kemampuan ini meliputi *verbal skill*, ke kemampuan untuk memperkerjakan dan memberhentikan, kontroling anggaran, yang semuanya dapat mempengaruhi hasil keputusan melalui pengambilan keputusan yang tergambarkan dalam peraturan, sumber daya dan transformasi hubungan yang menawarkan keuntungan.

Yang terakhir menurut Bryson et al dalam dimensi *Courts* terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu *Conflict-Mangement* dan *Sactioning Capabilities*. *Courts* sendiri terasosiasi dengan hukum (atau norma, prinsip, kebijakan, peraturan dan standar) dan cara pemberian sanksi (cara memberikan *reward* dan *punishment*). *Courts* digunakan untuk mengevaluasi keputusan atau perilaku dalam kaitannya dengan hukum atau

norma, yang biasanya untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk menegakan norma yang mendasari dalam sistem. Selain itu *courts* juga berperan untuk mendistribusikan dan mendistribusikan kembali akses ke pihak yang memiliki legitimasi dan dengan demikian membantu mempertahankan atau mengubah undang-undang atau cara pemberian sanksi lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Setelah analisis tersebut terlaksana peneliti berharap penggunaan konsep Ekoriparian dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan kolaboratif dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang terjadi di sekitar DAS Ciliwung. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor*".

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti memiliki posisi sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti untuk dapat menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai pembentukan tata kelola

pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat. Tiga dimensi tersebut mencakup *Forums, Arenas, dan Courts*.

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memaparkan data yang didapatkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber primer dan sekunder, yaitu wawancara secara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan oleh peneliti salah satunya dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Informan tersebut memiliki kriteria yang salah satunya dianggap oleh peneliti memiliki kapabilitas untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian yaitu pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif yang terlaksana dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, selain itu informan tersebut dianggap oleh peneliti memiliki informasi dan data yang menunjang untuk penelitian, dan selanjutnya informan tersebut bersedia untuk berbagi informasi yang dimilikinya kepada peneliti. Maka peneliti melakukan penentuan informan secara *purposive*. Teknik *purposive* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap kriteria informan tersebut, selanjutnya peneliti memilih informan utama (*key informant*) yang mencakup entitas:

Daftar Key Informant Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Perwakilan Pemerintah Kota Bogor (Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor)	1	Informan I
2	Perwakilan Satgas Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor	1	Informan II
3	Perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	1	Informan III
4	Perwakilan dari Satgas Sungai Ciliwung	1	Informan IV
5	Perwakilan dari Masyarakat Sekitar	2	

(data diolah oleh peneliti)

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pengujian validitas data yang bertujuan untuk menentukan akurasi dan kredibilitas data yang diperoleh di lapangan. Creswell dalam (Sumaryana et al., 2020) mengemukakan bahwa dalam metode penelitian kualitatif terdapat delapan cara teknik

pengujian validitas data, dimana peneliti dapat menggunakan salah satu atau beberapa cara untuk menghasilkan data yang memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi, sehingga selanjutnya dalam pembuatan kesimpulan yang dilakukan peneliti juga memiliki tingkat ketepatan yang akurat dan kredibel. Salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan uji validitas data adalah triangulasi data yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber selama proses pengumpulan data.

Selanjutnya peneliti melakukan pengujian reliabilitas data. Creswell dalam (Sumaryana et al., 2020) mengemukakan bahwa dalam metode penelitian kualitatif pengujian reliabilitas data dapat dilakukan dengan empat cara dengan tujuan peneliti dapat menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga pembuatan kesimpulan yang dilakukan peneliti juga memiliki tingkat konsistensi yang tinggi pula. Dalam melakukan pengujian reliabilitas data peneliti pertama-tama melakukan pengecekan kembali transkrip untuk memastikan tidak adanya kesalahan, kemudian peneliti melakukan pengecekan kembali dalam proses kodifikasi untuk menghindari adanya pergeseran makna dalam setiap kode dan terakhir melakukan *cross-check* terhadap hasil penelitian yang sudah dibuat kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bagian ini dilakukan peneliti dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data yang sudah diolah dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Teori Tiga Dimensi Pembentukan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif yang dikemukakan oleh Bryson et al pada tahun 2020. Tiga dimensi yang disebutkan tersebut mencakup: *forums*, *arenas*, dan *courts*. Kemudian berikut ini peneliti mengemukakan ketiga dimensi tersebut untuk menganalisis pembentukan tata

kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaesmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Dimensi *forums* merupakan dasar yang terpenting dalam pembentukan sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam teori yang dikemukakan oleh Bryson et al, terdapat beberapa aspek penting di dalam dimensi *forums*, yaitu: *Communicative Capability* dan *Interpretative Scheme*. *Communicative Capability* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kapasitas dalam menciptakan dan menyampaikan arti dari komunikasi yang terjadi dan *Interpretative Schemes* dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja intersubjektif yang manusia gunakan untuk membangun kognisi, interpretasi atau pemahaman terkait peristiwa yang memaknainya dan dapat memungkinkan manusia untuk mengartikulasikan dan mengevaluasi kembali peristiwa yang dialaminya (Bryson et al., 2020).

Dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaesmi ini sudah terjadi beberapa forum yang membahas terkait pengembangan program ini. Forum yang pertama kali dilakukan sesuai dengan penuturan dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dilakukan sekitar tahun 2020 yang dilakukan di lokasi Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaesmi. Forum tersebut diikuti oleh beberapa dinas terkait dan Satgas Sungai Ciliwung, dalam forum tersebut juga diselingi dengan melakukan penyusuran wilayah Ekoriparian yang berawal dari Perumahan Graha Grande sampai dengan lapangan terbuka di daerah ekoriparian tersebut. Forum yang diadakan selanjutnya merupakan rapat lanjutan mengenai hasil dari *feasibility study* atau studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Dalam forum tersebut dipaparkan materi terkait dengan

seluruh aspek proyek, konsep dan perencanaan dari pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaresmi. Dalam forum tersebut juga dilakukan penunjukan dinas-dinas yang terkait secara lebih lanjut dan peran-perannya dalam pengembangan program ini. Forum selanjutnya direncanakan akan dilakukan di akhir tahun 2021 ini untuk membahas hasil evaluasi kemajuan dari pengembangan program ini.

Akan tetapi walaupun sudah beberapa kali forum ini dilakukan terdapat pihak-pihak yang belum diikutsertakan dalam forum-forum tersebut, seperti perwakilan dari pihak swasta, komunitas penggerak pariwisata (Kompepar), UMKM, dan perwakilan masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan kurangnya *awareness* atau kesadaran akan hadirnya program ini di beberapa pihak tersebut. Alasan dari belum adanya perwakilan dari pihak swasta dalam forum-forum tersebut karena saat ini dari pihak pemerintah masih mencari pihak swasta yang akan mengisi porsi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pengembangan program ini sebagai mitra dalam skema *corporate social responsibilities* (CSR). Menurut penuturan dari perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sudah ada beberapa perusahaan yang ditargetkan untuk menjadi mitra tersebut, seperti perusahaan Bank BUMN dan BUMD yang beroperasi di Kota Bogor. Oleh karenanya kehadiran pihak swasta ini masih belum hadir dalam proses pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaresmi saat peneliti melakukan penelitiannya.

Ketidakhadiran masyarakat dalam forum-forum tersebut berakibat ketidaksadaran masyarakat sekitar terhadap program ini. Hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan bertanya kepada beberapa masyarakat yang berada di sekitar *signage* Ekoriparian, dan hasilnya seluruh masyarakat yang ditanya oleh peneliti belum mengetahui kehadiran

dari program ini. Hal serupa juga ditegaskan oleh Informan I bahwa memang tingkat *awareness* masyarakat masih rendah terhadap kehadiran program ini karena memang masih belum ada infrastruktur yang mencirikan Ekoriparian ini.

Dalam aspek *communicative capabilities* peneliti menganalisis bentuk komunikasi yang terjadi dalam dimensi forum. *Communicative capabilities* atau kemampuan komunikasi dari tiap-tiap pihak yang terlibat dalam forum ini akan menentukan pemahaman yang terjadi antara berbagai pihak yang ikut serta dalam pengembangan program ini yang selanjutnya akan dibahas dalam aspek selanjutnya yaitu *Interpretative Scheme*.

Kemampuan komunikasi antar pihak pemerintah dapat dinilai sudah baik dalam dimensi forum ini. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan dari berbagai dinas yang terkait dalam forum-forum yang sudah berjalan. Kesigapan dengan penunjukan peran-peran dari berbagai dinas setelah forum pembahasan studi kelayakan juga menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Bogor, Dinas dan OPD terkait. Akan tetapi kemampuan komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak lainnya belum terjadi secara baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pihak-pihak yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait dengan pengembangan program ini yang disebabkan oleh ketidakhadiran pihak tersebut dalam forum-forum tersebut dan kurangnya kemampuan komunikasi dari pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan program ini, seperti: Pihak Kelurahan Sukaresmi kepada masyarakat sekitar daerah tersebut dan Pihak Pemerintah Kota Bogor terhadap Pihak Swasta. Hal tersebut terjadi karena adanya kendala yang terjadi pada fokus Pemerintah Kota Bogor saat ini yang terpusat kepada pengendalian pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dan anggaran yang sudah direncanakan untuk pengembangan Ekoriparian ini

dialihkan terlebih dahulu untuk pengendalian Covid-19 di Kota Bogor.

Dalam aspek *interpretative scheme* peneliti menganalisis pemahaman interpretasi tentang pengembangan program ini dari berbagai pihak yang terlibat dalam forum-forum yang sudah berjalan. Pemahaman ini merupakan sebuah hal yang penting dalam sebuah forum karena akan berpengaruh terhadap proses keberjalanan forum dan berakibat juga terhadap pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif kedepannya. Menurut penuturan dari Informan IV, masih terdapat beberapa konsultan dari dinas-dinas terkait yang kurang memahami keadaan langsung di lokasi pengembangan program ini. Hal ini disebabkan karena konsultan tersebut belum secara langsung mengambil data dengan turun ke lokasi pengembangan program ini. Hal ini mengakibatkan terdapat data-data yang kurang optimal pada saat penyajiannya di forum studi kelayakan.

Ketidakhahaman dari pihak swasta dan pihak masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam forum-forum yang sudah terlaksana secara langsung berakibat kepada tingkat *awareness* dari pengembangan program ini. Salah satu penyebabnya adalah Pihak Pemerintah Kota Bogor yang memang belum melakukan sosialisasi secara masal kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Beberapa masyarakat yang peneliti tanyakan baru sekedar memahami bahwasannya pada daerah Delta Sungai Ciliwung tersebut memang sering dilakukan acara *bebersih* sungai yang sesekali dihadiri oleh Wali Kota Bogor saat itu. Pihak masyarakat yang memiliki pemahaman program yaitu Komunitas Penggerak Pariwisata (Kompepar) yang secara khusus diberikan pembekalan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor juga belum mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya. Hal ini menurut pemaparan dari perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

disebabkan oleh kurangnya anggota dari Kompepar dan kendala karena situasi pandemi Covid-19.

Selanjutnya dimensi *Arenas* menjadi salah satu dimensi yang penting dalam pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif. Aspek yang menjadi perhatian utama dalam dimensi ini adalah *Decision-Making Capabilities* atau kemampuan dalam mengambil keputusan. Menurut Pfeffer dalam (Bryson et al., 2020) kemampuan dalam mengambil keputusan oleh aktor yang ada untuk mempengaruhi tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan tergantung dari peraturan dan sumber daya yang dapat mereka gunakan.

Dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaresmi kemampuan dalam pengambilan keputusan oleh aktor strategis memiliki dampak yang signifikan dalam keberjalanan program ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam keberjalanan program ini adalah eksekusi program dari tiap dinas yang masih saling menunggu satu dengan dinas lainnya. Kendala ini dituturkan oleh Informan I dan Informan II. Salah satu penyebab dari kendala ini adalah kemajuan dari dinas yang terkait dalam pengembangan Ekoriparian yang berbeda-beda. Contohnya adalah pada saat ini Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah siap untuk mengeksekusi bagian dari pengembangan infrastruktur Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaresmi, akan tetapi eksekusi ini terhambat karena untuk pembangunan infrastuktur jalan tersebut masih harus menunggu kemajuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Selain itu pembangunan di sekitar Delta Sungai Ciliwung tersebut masih menunggu hasil analisis lanjutan untuk mendapatkan izin pembangunan infrastuktur di daerah ini.

Belum adanya pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan awal Ekoriparian ini merupakan sebuah hasil keputusan dari Pemerintah

Kota Bogor yang saat ini sedang memfokuskan sumber daya yang ada untuk pengendalian Covid-19, baik dalam sektor kesehatan dan ekonomi berupa *social safety net*. Akan tetapi sebagaimana yang dituturkan oleh Informan I, bahwasannya Wali Kota Bogor sebagai komando utama dalam pengembangan program ini sudah mengintruksikan agar program ini berjalan terus walaupun saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang berfokus untuk pengendalian pandemi Covid-19. Sehingga untuk mengisi porsi kehadiran pihak swasta ini akan dilakukan secepatnya, mengingat hal tersebut sudah direncanakan dan tinggal menunggu eksekusinya saja.

Kendala yang terjadi di pihak masyarakat seperti kurang maksimalnya peran Kompepar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar karena kekurangan anggota saat ini belum mendapatkan keputusan akan seperti apa selanjutnya, baik dari pihak Kelurahan Sukaresmi maupun dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Pihak masyarakat lainnya seperti UMKM di sekitar daerah ekoriparian juga belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan keikutsertaan mereka dalam pengembangan Ekoriparian, menurut Informan I hal ini berdasarkan keputusan untuk terlebih dahulu membentuk infrastruktur Ekoriparian terlebih baru kemudian mengajak UMKM setempat untuk ikut serta dan mengisi bagian yang disediakan untuk menjajakan produk-produk UMKM tersebut.

Dalam memecahkan kendala-kendala tersebut dibutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang tegas oleh aktor yang menjadi komando utama dalam pengembangan program ini, yaitu Wali Kota Bogor. Hal serupa juga disampaikan oleh Informan IV yang menuturkan bahwa sepatutnya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam pengembangan Ekoriparian ini memerlukan sebuah instruksi yang tepat dan tegas serta diiringi juga

dengan penggunaan strategi anggaran dan manajemen yang baik oleh aktor yang berperan sebagai komando utama dalam pengembangan program ini terlepas saat ini memang fokus dari Pemerintah Kota Bogor adalah penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Dimensi penting selanjutnya dalam pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif adalah *courts*. *Courts* sendiri terasosiasi dengan hukum (atau norma, prinsip, kebijakan, peraturan dan standar) dan cara pemberian sanksi (cara memberikan *reward* dan *punishment*). *Courts* digunakan untuk mengevaluasi keputusan atau perilaku dalam kaitannya dengan hukum atau norma, yang biasanya untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk menegakan norma yang mendasari dalam sistem. Dalam dimensi ini terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu: *Conflict-Management* dan *Sanctioning Capabilities Courts*.

Dalam proses pengembangan awal Ekoriparian ini ditemukan beberapa konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satunya ada terkait dengan penggunaan lahan di sekitar Delta Sungai Ciliwung yang akan digunakan untuk pembangunan *jogging track*. Menurut penuturan dari Informan III, pihak masyarakat yang mempunyai lahan di sekitar daerah yang akan digunakan sebagai *jogging track* tersebut meminta kompensasi berupa sewa lahan terhadap Pemerintah Kota Bogor dengan jangka waktu yang ditetapkan. Akan tetapi dari perencanaan anggaran yang sudah dialokasikan tidak menutupi hal tersebut. Untuk menyelesaikan konflik ini akan ada musyawarah terlebih dahulu dengan warga yang memiliki lahan di sekitar daerah pengembangan Ekoriparian ini, hal ini ditujukan untuk menghindari konflik yang semakin kompleks kedepannya. Hal ini tentunya menunjukkan kemampuan manajemen konflik yang digunakan dalam memecahkan konflik yang ada sudah baik. Dengan menggunakan pendekatan

musyawarah dan pemahaman antara batas-batas kewenangan antara pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan Ekoriparian ini kedepannya diharapkan dapat mengurangi potensi konflik lainnya.

Pemberian *reward* dan *punishment* dari tiap-tiap pihak yang ikut serta dalam pengembangan ekoriparian ini secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang mengamanatkan kewajiban kepada setiap orang dalam pengelolaan DAS dan pemeliharaan lahan yang ada dalam pasal 30 ayat (1-2) dan diterangkan juga sanksi yang ada apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja melakukan konservasi lahan DAS yang mengakibatkan degradasi berat pada pasal 60 ayat 2 dan 5. Pelaksanaan dari *reward* dan *punishment* ini belum terlalu terlihat dalam proses pembentukan awal tata kelola pemerintahan kolaboratif yang terjadi dalam pengembangan Ekoriparian ini. Hal ini disebabkan oleh dalam tahapan ini proses yang terjadi diantara pihak-pihak yang terkait masih dalam batas perencanaan. Masih berkembangnya hasil-hasil dari analisis yang dilakukan tiap pihak dan masih berlangsungnya penyelesaian konflik-konflik oleh pihak-pihak tertentu.

Pemberian pemahaman terhadap batasan-batasan dan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak dan sanksi yang akan diatur kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik. Menurut penuturan dari Informan III pembekalan kepada Kompepar juga termasuk pemberian pemahaman untuk menjaga potensi dan kekhasan dari daerah Ekoriparian ini. Akan tetapi dengan kendala yang dihadapi oleh Kompepar saat ini apabila tidak diselesaikan dengan cepat akan berakibat kepada proses pengembangan Ekoriparian

kedepannya. Bentuk pemahaman dari peran dan wewenang dari masyarakat sekitar menjadi hal yang penting sebagaimana yang dituturkan oleh Informan I, jika kedepannya seluruh infrastruktur di ekoriparian ini sudah rampung tetapi masyarakat sekitar tidak mempunyai pemahaman yang baik terhadap peran dan wewenangnya dikhawatirkan pengelolaan dari Ekoriparian ini tidak akan berjalan maksimal. Dengan adanya pernyataan tersebut mengaskan kembali bahwa pentingnya sebuah pemahaman sebagaimana yang dibahas dalam dimensi sebelumnya yang akan saling terkait dengan kedua dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif lainnya. Sehingga penerapan *reward* dan *punishment* dalam proses selanjutnya dapat dipahami secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung Kelurahan Sukaresmi.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor belum terbentuk. Hal ini didasarkan oleh analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pada dimensi *forums*, aspek *communicative capability* atau kemampuan komunikasi dari pihak Pemerintah Kota Bogor dalam forum-forum yang terlaksana selama proses

pengembangan awal Ekoriparian ini dapat dinilai sudah baik. Hal ini dapat terlihat dari kehadiran dari tiap Dinas dan OPD terkait dalam setiap forum yang terlaksana sebelumnya. Akan tetapi kemampuan komunikasi dengan pihak-pihak lain di luar Pemerintah Kota Bogor dapat dinilai belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari masih belum ditentukannya pihak swasta yang akan menjadi mitra dan mengisi posisi dalam pengembangan Ekoriparian ini, sehingga dalam forum-forum yang sudah terlaksana sebelumnya masih belum ada perwakilan dari pihak swasta yang hadir. Selanjutnya masih rendahnya *awareness* dari masyarakat sekitar menjadi bukti bahwa kemampuan komunikasi dari aktor yang berperan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar belum berjalan secara baik. Menyambung dari aspek sebelumnya, dalam aspek *interpretative schemes* atau pemahaman dari tiap-tiap pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekoriparian dapat dinilai masih rendah terutama dari pihak masyarakat, hal ini menyambung dari kemampuan komunikasi yang belum baik dari aktor-aktor yang memiliki peran untuk memberikan pemahaman terkait dengan pengembangan Ekoriparian di daerah sekitar masyarakat berada.

2. Pada dimensi *arenas*, aspek *decision-making capabilities* atau kemampuan dalam mengambil keputusan oleh aktor yang terkait dalam pengembangan Ekoriparian ini dapat

dinilai belum baik, terlepas dari keputusan dari Pemerintah Kota Bogor yang saat ini sedang memfokuskan perhatiannya kepada pengendalian pandemi Covid-19, dengan ditemukannya kendala dari dinas yang saling menunggu satu sama lainnya untuk melakukan eksekusi dari tugas yang sudah dimandatkan kepada dinas-dinas dan OPD terkait serta ditemukannya kendala dari Kompepar yang saat ini kekurangan anggota yang menyebabkan tidak maksimalnya peran Kompepar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya menunjukkan bahwa masih kurang baiknya keputusan-keputusan yang diberikan oleh aktor terkait dalam merancang strategi-strategi dalam pengembangan Ekoriparian ini.

3. Pada dimensi *courts*, aspek *conflict-management* oleh aktor terkait dalam pengembangan ekoriparian ini dapat dinilai sudah baik, hal ini berdasarkan dari strategi penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak pemerintah dan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah yang diharapkan dapat secara langsung menyelesaikan seluruh konflik yang muncul saat ini sebelum proses pengembangan Ekoriparian ini berlanjut ke tahap yang lebih lanjut. Dalam aspek *sanctioning capabilities* atau kemampuan dalam pemberian sanksi, saat ini secara umum *reward* dan *punishment* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang mengamanatkan kewajiban kepada setiap orang dalam pengelolaan DAS dan pemeliharaan lahan yang ada dalam pasal 30 ayat (1-2) dan diterangkan juga sanksi yang ada apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja melakukan konservasi lahan DAS yang mengakibatkan degradasi berat pada pasal 60 ayat 2 dan 5. Akan tetapi karena tingkat pemahaman dari pihak masyarakat masih kurang yang disebabkan oleh kurang baiknya kemampuan komunikasi dari aktor-aktor yang berperan. Oleh karena itu pemahaman atas batasan dan wewenang serta *reward* dan *punishment* saat proses pengembangan awal Ekoriparian ini belum jelas keberadaannya karena tingkat pemahaman dari pihak masyarakat yang belum baik serta masih absennya pihak swasta yang terlibat dalam proses pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Kusumastanto, T., Adrianto, L., & Sadelie, A. (2018). Identifikasi Aktifivitas Ekonomi Dan Nilai Ekonomi Spasial Das Ciliwung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(2), 223–234. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.223-234>
- Alfian, F., & Vitaloka, D. (2018). Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.898>
- Alviya, I., Yosefi Suryandari, E., Maryani, R., & Muttaqin, Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 13(2), 121–134. <https://doi.org/10.20886/jsek.2016.13.2.121-134>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Seo, D. (2020). Using a design approach to create collaborative governance. *Policy and Politics*, 48(1), 167–189. <https://doi.org/10.1332/030557319X15613696433190>
- Cahyono, S. A. (2015). Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat di DAS Ciliwung. *Seminar Nasional Restorasi DAS: Mencari Keterpaduan Di Tengah Isu Perubahan Iklim*, 542–551.
- Kadri, T. (2006). Sedimentasi akibat degradasi das ciliwung-cisadane. *Jurnal Sipil*, 6(2), 49–56.
- Pontoh, N. K., & Sudrajat, D. J. (2009). Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Limpasan Air Permukaan. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 16(3), 44–56.
- Pramono, I. B., Savitri, E., Syahrul, D., Basuki, T. M., Supangat, A. B., Cahyono, S. A., & Bambang, R. (2016). *Restorasi DAS Ciliwung* (1st ed.). UNS Press.
- Radnawati, D., & Makhmud, D. F. (2020). Desain Lanskap Ekoriparian Babakan Pasar, Bogor. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(1), 23–32. <https://doi.org/10.29244/jli.12.1.2020.23-33>
- Rahmawaty, L. (2019). Mentri LHK Ingin Pemulihan DAS Konsep Ekoriparian diperluas. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/924260/menteri-lhk-ingin-pemulihan-das-konsep-ekoriparian-diperluas#mobile-src>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta Bandung.
- Sumaryana, A., Nurasa, H., & Sukarno, D. (2020). *Panduan Untuk Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir* (Edisi 2).

Suwarno, J., Kartodiharjo, H., Pramudya, B., & Rachman, S. (2011). Policy Development of Sustainable Watershed Management of Upper Ciliwung, Bogor Regency. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 8(2), 115–131.

Wasis, B., & Erizal. (2013). Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) DAS Ciliwung. *Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST)*.